SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA INDONESIA YANG BERCERAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

(Analisis Putusan Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : ASMAN

NPM : 200710115050

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	ASMAN
NPM	:	200710115050
FAK/PROG STUDI	:	HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA INDONESIA YANG BERCERAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (Analisis Putusan Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI	PEMBIMBING TEKNIS
BURHANUDIN HASAN, SH., MH.	AHMAD BAIHAKI, SHi

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : ASMAN

NPM : 200710115050

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Indonesia yang Bercerai Akibat Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (analisis putusan Perkawinan Nomor : 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 26 Agustus 2011

Yang Membuat Pernyataan



(Asman)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/AK/XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ASMAN

NPM : 200710115050

FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA INDONESIA YANG BERCERAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TENTANG KEWARGANEGARAAN

(Analisis Putusan Perkara Nomor: 309/Pdt.G/PN.Bekasi)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2010 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji :	Tanda Tangan
DR. Muhamad Ibarahim Dekan	.....
Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM.,MBA Ketua Penguji	.....
Sawitri Yuli Hartati S, SH., MH Penguji I	.....
AA I Made Bagas Agastia, SE., MH Penguji I	.....

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan pura-pura itulah sebenarnya yang menimbulkan permusuhan dan pengkhianatan.

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain.

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini Kupersembahkan Kepada :

1. PAMAN H. GIMARUDIN
2. IBU ZAMARIA
3. ISTRI JAMILA LAONDE
4. ANAKKU TERCINTA DIMAS MUKTHAR

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa disertai berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penulisan skripsi yang berjudul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Indonesia Yang Bercerai Akibat Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Analisis Putusan Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi)".**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharap kritik membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lupa penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi. Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanudin Hasan, SH., MH., Selaku Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehatnya.

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

4. Bapak Ahmad Baihaki, SHi., Selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
5. Seluruh Dosen, Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu serta semua anggota keluarga yang turut memberikan dorongan do'a dan materi.
7. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terhadap semua kebaikannya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan perbuatan baiknya mendapatkan pahala yang setimpa dari Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan rahmat kepada kita semua.

Pada kesempatan ini pula penulis berharap semoga penulis skripsi ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan buat pembaca.

Depok, Agustus 2010

Penulis

ASMAN

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

ABSTRAK

Asman, 200710115050, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Indonesia Yang Bercerai Akibat Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Analisis Putusan Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

Perkawinan campuran telah merambah ke-seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : *"yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"*. Dari penelitian ini maka muncul identifikasi dari rumusan masalah yang meliputi sebagai berikut : bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang bercerai akibat perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum indonesia. Sedangkan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang bercerai akibat perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 seorang perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan pria warganegara asing tidak dengan sendirinya harus tunduk pada hukum yang berlaku bagi si suami. Hal ini tentunya juga berkaitan erat dengan perceraian pada suatu perkawinan campuran, oleh karena dalam perceraian pada pasangan yang berkewarganegaraan berbeda dapat menyebabkan timbulnya permasalah Hukum Antar Tata Hukum yang disebabkan adanya unsur asing dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi, maka penyelesaian dalam perceraian memerlukan ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pengesahan iii

Moto dan Persembahan iv

Kata Pengantar v

Abstrak vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran 9

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan..... 19

B. Syarat-syarat Perkawinan 22

C. Pengertian Perkawinan Campuran..... 23

D. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran 27

E. Asas-asas HATAH mengenai Perkawinan Campuran 32

F. Akibat Hukum Perkawinan Campuran 35

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi 40

B. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 43

B. Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 53

C. Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campura 68

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Indonesia Yang Bercerai Akibat Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 76

B. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Perlindungan Hukum..., Asman, Fakultas Hukum 2010